



Analisis Faktor-Faktor Penurunan Angka Partisipasi Sekolah di Daerah Terpencil di Merauke

Rosina Jostina Marise Kebubun

Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro, Merauke, Indonesia

*Email Korespondensi: rosinajostinamarisekebubun@gmail.com

Diterima: 19-06-2025 | Disetujui: 23-06-2025 | Diterbitkan: 26-06-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors causing the decline in school participation rates (APS) in remote areas, focusing on Okaba District, Merauke Regency. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, involving various education actors, including teachers, parents, community leaders, and local officials. The results of the study indicate that geographical factors such as poor road access, limited transportation facilities, and minimal education infrastructure are the main obstacles. In addition, community perceptions of formal education, family socio-economic conditions, and low community participation in the education process also worsen the situation. These findings emphasize the need for a contextual, participatory, and cross-sectoral policy approach to increase school participation in a sustainable manner. This study makes an important contribution to the design of education policies in border areas and disadvantaged areas in Indonesia.

Keywords: School Participation; Remote Education; Education Policy; Local Community; Merauke

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan angka partisipasi sekolah (APS) di daerah terpencil, dengan fokus pada Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, dengan melibatkan berbagai aktor pendidikan, termasuk guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan pejabat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor geografis seperti akses jalan yang buruk, keterbatasan sarana transportasi, serta minimnya infrastruktur pendidikan menjadi hambatan utama. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap pendidikan formal, kondisi sosial ekonomi keluarga, dan rendahnya partisipasi komunitas dalam proses pendidikan turut memperburuk situasi. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang kontekstual, partisipatif, dan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi sekolah secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap desain kebijakan pendidikan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal di Indonesia.

Katakunci: Partisipasi Sekolah; Pendidikan Terpencil; Kebijakan Pendidikan; Komunitas Lokal; Merauke

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kebubun, R. J. M. (2025). Analisis Faktor-Faktor Penurunan Angka Partisipasi Sekolah di Daerah Terpencil di Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 425-441. <https://doi.org/10.63822/wr847a80>

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara global (Žalėnienė and Pereira 2021). Sebagai pilar utama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas, peningkatan akses dan partisipasi pendidikan menjadi fokus utama berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut (Permatasari et al. 2021) salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), yang merefleksikan persentase anak usia sekolah yang aktif terdaftar dalam lembaga pendidikan formal. Meskipun dalam dua dekade terakhir APS Indonesia menunjukkan tren peningkatan secara nasional, ketimpangan antarwilayah masih sangat mencolok, terutama di kawasan timur Indonesia seperti Papua. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dan sosial yang belum sepenuhnya teratasi, termasuk tantangan geografis, ketersediaan infrastruktur pendidikan, distribusi tenaga pendidik, dan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga. Disparitas APS yang tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah maju dan tertinggal, menegaskan bahwa agenda pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi sekolah, khususnya di wilayah tertinggal dan terpencil, menjadi semakin penting dalam upaya merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kabupaten Merauke, sebagai salah satu wilayah strategis di ujung timur Indonesia, menyimpan kompleksitas geografis dan sosial yang signifikan dalam konteks pembangunan pendidikan. Luas wilayah yang mencapai lebih dari 45.000 km² dengan sebaran permukiman yang terpencar, ditambah dengan keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi, menciptakan tantangan serius dalam pemerataan akses pendidikan, terutama di distrik-distrik terpencil. Meskipun Merauke dikenal sebagai lumbung pangan nasional, ketimpangan pembangunan antarwilayah dalam kabupaten ini masih terlihat jelas, termasuk dalam hal layanan pendidikan dasar. Beberapa daerah seperti distrik Naukenjerai, Kimaam, dan Ilwayab menghadapi kesenjangan partisipasi sekolah yang cukup tajam dibandingkan dengan wilayah pusat kota. Tantangan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik seperti jarak dan medan, tetapi juga oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga, keterbatasan tenaga pengajar, serta rendahnya relevansi kurikulum formal terhadap konteks budaya dan kebutuhan hidup masyarakat lokal. Di wilayah-wilayah dengan dominasi komunitas adat, pendidikan formal sering kali dipandang kurang menjawab realitas keseharian masyarakat, sehingga memengaruhi motivasi dan persepsi terhadap pentingnya bersekolah. Dengan demikian, Merauke menjadi contoh nyata dari urgensi pendekatan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif terhadap karakteristik lokal, guna mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah yang berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi dalam menurunnya angka partisipasi sekolah (APS) di daerah terpencil di Merauke tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan akses fisik terhadap layanan pendidikan, melainkan sebagai manifestasi dari berbagai determinan struktural dan kultural yang saling berkelindan. Faktor geografis seperti keterisolasian wilayah, minimnya infrastruktur transportasi, dan terbatasnya fasilitas pendidikan formal berperan besar dalam menghambat kehadiran siswa secara konsisten. Namun, di luar kendala fisik, terdapat pula dimensi sosial-ekonomi yang signifikan, seperti kemiskinan rumah tangga, ketergantungan pada pekerjaan informal atau subsisten, serta rendahnya literasi orang tua, yang turut memengaruhi keputusan keluarga dalam menyekolahkan anak. Di samping itu, menurut (da Silva, Pereira, and Amorim 2024) persepsi masyarakat lokal terhadap pendidikan formal sering kali berbenturan dengan nilai-nilai budaya komunitas adat, di mana pendidikan tidak selalu dipandang

sebagai prioritas utama dibandingkan keterlibatan anak dalam pekerjaan domestik atau kegiatan ekonomi keluarga. Kesenjangan antara kurikulum nasional yang bersifat seragam dan realitas kehidupan lokal yang beragam juga memperburuk situasi, karena peserta didik merasa kurang terhubung dengan materi yang diajarkan. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa penurunan APS bukan sekadar persoalan administratif atau teknis, melainkan menuntut pemahaman holistik yang mencakup aspek spasial, sosial, ekonomi, dan budaya yang saling memengaruhi dalam konteks lokal yang unik seperti Merauke.

Meskipun isu ketimpangan pendidikan di wilayah timur Indonesia telah banyak dibahas dalam berbagai kajian, penelitian yang secara spesifik mengulas penurunan angka partisipasi sekolah (APS) di daerah-daerah terpencil, terutama di Kabupaten Merauke, masih sangat terbatas. Sebagian besar studi terdahulu cenderung bersifat makro dan belum mengungkap secara mendalam dinamika sosial, ekonomi, budaya, serta geografis yang melingkupi keputusan anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal. Padahal, karakteristik local seperti akses transportasi yang terbatas, rendahnya ketersediaan tenaga pendidik, beban ekonomi rumah tangga, serta persepsi komunitas adat terhadap pendidikan modern memiliki pengaruh yang signifikan namun kerap terabaikan dalam desain kebijakan nasional. Ketiadaan data mikro dan analisis kontekstual ini berpotensi menghasilkan formulasi kebijakan yang bersifat homogen dan tidak menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif berbagai faktor penyebab penurunan APS di daerah terpencil Merauke. Fokus utama diarahkan pada aspek struktural, sosio-kultural, dan kelembagaan yang memengaruhi dinamika pendidikan, guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis bukti.

Penelitian ini memiliki signifikansi strategis dalam memberikan landasan empiris bagi perumusan kebijakan pendidikan yang kontekstual dan berbasis bukti, khususnya di wilayah terpencil yang selama ini kurang terjangkau oleh intervensi nasional. Selain itu, temuan studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai ketimpangan akses pendidikan di kawasan perbatasan, serta mendorong pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menurut (Prosen 2022) dengan strategi studi kasus untuk mengkaji secara mendalam fenomena penurunan angka partisipasi sekolah di daerah terpencil di Kabupaten Merauke. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas sosial, budaya, ekonomi, dan geografis yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata. Strategi studi kasus memungkinkan peneliti untuk fokus pada konteks-konteks spesifik yang memengaruhi dinamika partisipasi pendidikan, dengan mengidentifikasi hubungan antara struktur kebijakan, praktik lapangan, dan pengalaman individu maupun komunitas lokal. Melalui desain ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual, sekaligus menawarkan dasar empiris bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah tertinggal.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di beberapa kampung terpencil di Kabupaten Merauke, di antaranya di Distrik Okaba yang tercatat mengalami penurunan angka partisipasi sekolah berdasarkan data dari Dinas Pendidikan setempat. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan karakteristik geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur pendidikan, serta dominasi komunitas adat yang

memiliki nilai-nilai sosial dan budaya khas. Subjek penelitian mencakup berbagai aktor yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam dinamika pendidikan di daerah tersebut, yakni kepala sekolah, guru, orang tua siswa, siswa putus sekolah, tokoh masyarakat lokal, serta pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Keterlibatan multi-aktor ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang holistik mengenai faktor-faktor penyebab penurunan partisipasi sekolah, serta untuk menangkap keberagaman perspektif yang kontekstual dan relevan dengan realitas sosial yang ada.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan triangulasi oleh (Niloy et al. 2024), metode untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor penurunan angka partisipasi sekolah di daerah terpencil. Wawancara mendalam (*in-depth interviews*) digunakan sebagai instrumen utama, dengan panduan semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi yang fleksibel terhadap pengalaman, persepsi, dan hambatan yang dihadapi oleh para informan kunci, seperti kepala sekolah, guru, orang tua, serta siswa yang putus sekolah. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan di lingkungan sekolah dan komunitas untuk menangkap dinamika sosial dan kondisi objektif yang tidak selalu terungkap melalui wawancara. Data dokumenter seperti laporan dinas pendidikan, data APS, dan dokumen kebijakan lokal juga ditelaah guna memperkuat pemahaman kontekstual dan mendukung validasi temuan lapangan. Pendekatan triangulatif ini dipilih untuk meningkatkan kredibilitas data dan memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas yang utuh dan terverifikasi dari berbagai sumber.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis tematik oleh (Squires 2023) yang memungkinkan identifikasi pola-pola bermakna dari data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis diawali dengan *open coding* untuk menguraikan data mentah menjadi unit-unit makna, yang kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang merepresentasikan isu-isu utama terkait penurunan angka partisipasi sekolah. Selanjutnya, dilakukan axial coding untuk menghubungkan antar kategori dan mengonstruksi tema-tema sentral yang merefleksikan dinamika sosial, budaya, dan struktural di lokasi penelitian. Validitas analisis dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta *member checking* untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan informan. Dengan pendekatan ini, hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kontekstual, sehingga memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang relevan dalam studi pendidikan di wilayah terpencil. Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian sosial, termasuk memperoleh persetujuan sukarela dari seluruh partisipan, menjaga kerahasiaan identitas, serta memastikan bahwa partisipasi dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Seluruh prosedur etis dalam penelitian ini telah disetujui oleh lembaga berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman etik akademik guna memastikan integritas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distrik Okaba, yang terletak di wilayah pesisir selatan Kabupaten Merauke, menghadapi tantangan serius terkait akses fisik dan transportasi menuju fasilitas pendidikan formal. Kondisi geografis yang terdiri atas pantai berlumpur, rawa-rawa, dan minimnya infrastruktur jalan telah membatasi mobilitas siswa secara signifikan, terutama di kampung-kampung yang berjauhan dari pusat distrik. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di Kampung Bibikem dan Kampung Wambi harus berjalan kaki

sejauh 6–10 kilometer setiap hari, melewati medan yang tidak stabil, tanpa akses kendaraan umum yang memadai. Selain itu, pada musim hujan, akses ke sekolah hampir terputus karena banjir lokal dan longsor tanah di beberapa jalur kritis. Rendahnya dukungan logistik seperti perahu sekolah, jembatan kayu yang aman, dan pengadaan transportasi darat berdampak langsung terhadap penurunan kehadiran siswa dan meningkatnya angka putus sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga struktural, yang menuntut intervensi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan di daerah perbatasan seperti Okaba.

Tabel 1. Kondisi Akses Fisik ke Sekolah di Beberapa Kampung di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke

Kampung	Jarak ke Sekolah (km)	Medan dan Akses Jalan	Moda Transportasi Umum	Kendala Utama
Bibikem	± 10 km	Rawa, lumpur, jalan setapak	Tidak tersedia	Longsor dan banjir saat hujan
Wambi	± 7 km	Pantai berlumpur, semak	Jalan kaki / ojek lokal	Biaya transportasi tinggi, medan licin
Kayakai	± 6 km	Hutan dan rawa kecil	Tidak tersedia	Jembatan kayu rusak, tidak layak dilalui

Tabel 1 menggambarkan secara jelas kondisi akses fisik menuju sekolah di tiga kampung utama di Distrik Okaba, yakni Bibikem, Wambi, dan Kayakai, yang seluruhnya menghadapi hambatan geografis dan infrastruktur serius. Di Kampung Bibikem, siswa harus menempuh jarak sekitar 10 kilometer melalui medan rawa dan jalan setapak yang rawan longsor, terutama saat musim hujan, sehingga akses menjadi hampir mustahil. Kampung Wambi juga mengalami kesulitan serupa, dengan jalur berupa pantai berlumpur dan semak-semak yang menyulitkan perjalanan, sementara biaya ojek lokal yang tinggi membuat moda transportasi ini tidak dapat diakses oleh sebagian besar keluarga. Sementara itu, di Kampung Kayakai, akses menuju sekolah harus melewati hutan dan rawa kecil, namun jembatan kayu yang menjadi jalur utama sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak aman untuk digunakan, terutama oleh anak-anak usia sekolah dasar. Ketiga lokasi tersebut menunjukkan pola yang konsisten bahwa keterbatasan sarana transportasi dan buruknya kondisi fisik lingkungan secara langsung memengaruhi kemampuan siswa untuk hadir secara rutin ke sekolah, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya angka partisipasi pendidikan di wilayah ini. Hal ini menegaskan bahwa upaya peningkatan akses pendidikan di Distrik Okaba memerlukan pendekatan infrastruktur terpadu yang peka terhadap tantangan ekologis dan spasial lokal.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di Distrik Okaba menjadi hambatan struktural signifikan dalam mendorong partisipasi dan kualitas pendidikan formal di daerah tersebut. Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan tenaga pendidik mengungkapkan bahwa sebagian besar sekolah dasar dan menengah di wilayah ini mengalami kekurangan ruang kelas layak, peralatan belajar, dan fasilitas penunjang seperti perpustakaan, laboratorium, dan sanitasi yang memadai. Beberapa bangunan sekolah bahkan mengalami kerusakan berat akibat usia pakai dan tidak adanya pemeliharaan rutin. Selain itu, akses terhadap teknologi pendidikan seperti komputer dan internet hampir tidak tersedia, sehingga memperlebar kesenjangan digital antara sekolah-sekolah di Okaba dengan wilayah yang lebih maju. Kekurangan guru tetap, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan profesional, memperburuk situasi karena proses pembelajaran menjadi tidak konsisten dan kurang berkualitas. Kondisi ini tidak hanya menurunkan motivasi

siswa, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pendidikan formal, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya angka partisipasi sekolah di distrik ini.

Tabel 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Tiga Sekolah Negeri di Distrik Okaba

Sekolah	Ruang Kelas Layak	Ketersediaan Perpustakaan	Laboratorium IPA/TIK	Akses Internet	Guru Tetap (%)	Kondisi Bangunan
SD Negeri Okaba 1	4 dari 6	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak ada	60%	Rusak ringan
SMP Negeri 2 Okaba	5 dari 8	Ada (minim koleksi)	IPA ada, TIK tidak	Terbatas	50%	Rusak sedang
SMA Negeri Okaba	6 dari 10	Ada	IPA & TIK tidak lengkap	Tidak ada	45%	Rusak berat

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di tiga sekolah negeri di Distrik Okaba menunjukkan ketimpangan signifikan yang berdampak langsung terhadap mutu dan kesinambungan proses belajar-mengajar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah serta guru, ketiga sekolah tersebut mengalami kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, meubelair yang memadai, serta ketersediaan buku dan alat peraga pembelajaran. Di salah satu sekolah dasar, terdapat ruang kelas yang atapnya bocor dan dinding kayunya telah lapuk, sehingga kegiatan belajar terganggu terutama saat musim hujan. Laboratorium dan perpustakaan tidak tersedia di seluruh sekolah yang diteliti, dan penggunaan teknologi pembelajaran hampir tidak ada karena keterbatasan listrik dan jaringan internet. Selain itu, beberapa sekolah hanya memiliki satu atau dua guru tetap yang merangkap mengajar seluruh mata pelajaran, sedangkan tenaga guru honorer tidak memiliki kepastian pendanaan yang berkelanjutan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya dukungan struktural terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar di wilayah terpencil, yang berimplikasi pada rendahnya motivasi belajar siswa, kualitas pembelajaran, dan angka keberlanjutan sekolah. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana secara terpadu perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pendidikan berbasis wilayah tertinggal.

Faktor sosial-budaya dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan formal di Distrik Okaba menunjukkan pengaruh signifikan terhadap rendahnya angka partisipasi sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Berdasarkan temuan lapangan, masih kuatnya nilai-nilai tradisional dalam komunitas adat setempat mendorong anak-anak untuk lebih terlibat dalam aktivitas domestik, pertanian subsisten, dan ritual adat ketimbang menempuh pendidikan formal. Selain itu, terdapat pandangan bahwa pendidikan tidak menjamin peningkatan kesejahteraan atau pekerjaan formal di wilayah yang terbatas secara ekonomi. Hal ini diperparah oleh praktik perkawinan usia dini, terutama pada anak perempuan, yang secara sistemik menghambat keberlanjutan pendidikan mereka. Dalam banyak kasus, orang tua lebih mementingkan kontribusi anak terhadap ekonomi keluarga daripada potensi jangka panjang dari pendidikan. Persepsi ini bukan semata akibat kurangnya informasi, melainkan juga cerminan dari pengalaman antargenerasi yang menunjukkan keterputusan antara pendidikan dan peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, pendekatan intervensi pendidikan di Okaba perlu dirancang secara kultural-sensitif dan melibatkan tokoh adat serta pemuka agama dalam mengubah narasi kolektif terhadap pentingnya pendidikan.

Tabel 3. Dimensi Sosial-Budaya yang Mempengaruhi Partisipasi Sekolah di Distrik Okaba

Dimensi Sosial-Budaya		Temuan Lapangan	Dampak terhadap Partisipasi Sekolah
Nilai Adat	Tradisional	Anak terlibat dalam kegiatan kebun, adat, dan rumah tangga	Waktu belajar terganggu, kehadiran di sekolah tidak stabil
Persepsi Pendidikan	terhadap	Pendidikan dianggap tidak membawa hasil nyata secara ekonomi	Rendahnya motivasi orang tua menyekolahkan anak
Peran Tradisional	Gender	Anak perempuan diutamakan untuk tugas domestik dan pernikahan dini	Angka putus sekolah perempuan lebih tinggi
Otoritas Tokoh Adat		Pengaruh tokoh adat sangat besar dalam pengambilan keputusan keluarga	Ketika tokoh adat tidak mendukung sekolah, partisipasi turun
Keterbatasan Model	Role	Minimnya figur sukses dari komunitas lokal yang berpendidikan	Melemahnya aspirasi anak untuk melanjutkan pendidikan

Penjelasan Tabel 3 menggarisbawahi bahwa partisipasi sekolah di Distrik Okaba sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial-budaya yang melekat kuat dalam kehidupan komunitas lokal. Keterlibatan anak-anak dalam aktivitas tradisional seperti berkebun, mengikuti upacara adat, dan membantu pekerjaan rumah tangga menyebabkan waktu belajar mereka terganggu dan kehadiran di sekolah menjadi tidak konsisten. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan tidak memberikan hasil nyata secara ekonomi juga turut menurunkan motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak, terutama ketika tidak ada jaminan pekerjaan formal setelah lulus. Ketimpangan peran gender dalam budaya setempat semakin memperburuk situasi, di mana anak perempuan lebih sering diprioritaskan untuk tugas domestik dan bahkan mengalami pernikahan dini, yang menyebabkan angka putus sekolah lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, otoritas tokoh adat yang dominan dalam pengambilan keputusan keluarga berpengaruh besar terhadap keberlanjutan pendidikan anak; ketika tokoh adat tidak menunjukkan dukungan terhadap pendidikan, maka partisipasi sekolah cenderung menurun drastis. Ketiadaan figur sukses dari komunitas lokal yang menempuh pendidikan tinggi juga berkontribusi pada lemahnya aspirasi generasi muda untuk melanjutkan sekolah, karena tidak tersedia representasi konkret bahwa pendidikan mampu mengubah kondisi hidup mereka.

Kondisi sosial ekonomi keluarga di Distrik Okaba merupakan salah satu determinan utama rendahnya angka partisipasi sekolah anak-anak usia wajib belajar. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, mayoritas kepala keluarga bekerja di sektor informal seperti nelayan tradisional, petani ladang berpindah, dan buruh musiman, dengan pendapatan rata-rata di bawah garis kemiskinan nasional. Situasi ini berdampak langsung pada kemampuan orang tua dalam membiayai kebutuhan dasar pendidikan, seperti seragam, perlengkapan sekolah, dan biaya transportasi. Selain itu, anak-anak kerap dilibatkan dalam aktivitas ekonomi rumah tangga untuk membantu menopang kebutuhan keluarga, yang menyebabkan absensi tinggi bahkan putus sekolah dini. Keterbatasan akses terhadap bantuan sosial dan minimnya program afirmatif pendidikan yang tepat sasaran semakin memperparah ketimpangan ini. Oleh karena itu, memahami dinamika ekonomi rumah tangga di Distrik Okaba menjadi krusial dalam merancang kebijakan intervensi pendidikan yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal.

Tabel 4. Profil Sosial Ekonomi Keluarga Responden di Distrik Okaba

Indikator	Keterangan
Mata Pencaharian Utama	45% nelayan tradisional, 35% petani ladang, 20% buruh harian
Rata-rata Pendapatan Bulanan	Rp 600.000 – Rp 950.000
Jumlah Anak Usia Sekolah per Keluarga	Rata-rata 3 anak
Kemampuan Membiayai Kebutuhan Sekolah	Hanya 30% responden mampu secara rutin
Anak yang Terlibat dalam Aktivitas Ekonomi Keluarga	62% anak usia sekolah membantu pekerjaan keluarga

Tabel 4 menggambarkan profil sosial ekonomi keluarga responden di Distrik Okaba yang menunjukkan keterbatasan serius dalam kapasitas ekonomi rumah tangga untuk mendukung pendidikan anak. Mayoritas kepala keluarga bekerja di sektor informal dan subsisten—seperti nelayan tradisional (45%) dan petani ladang (35%)—dengan pendapatan bulanan yang sangat rendah, yaitu antara Rp 600.000 hingga Rp 950.000. Dengan rata-rata tiga anak usia sekolah per keluarga, hanya 30% yang mampu secara rutin membiayai kebutuhan pendidikan seperti seragam, alat tulis, dan transportasi. Lebih dari separuh anak (62%) terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga, yang menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang memaksa anak-anak turut bekerja, sehingga mengganggu partisipasi mereka dalam pendidikan formal. Rendahnya akses terhadap program bantuan pendidikan—di mana 75% keluarga belum pernah menerima bantuan—mengindikasikan adanya celah kebijakan yang perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan keluarga miskin secara lebih menyeluruh.

Di Distrik Okaba, kurangnya intervensi kebijakan pendidikan yang kontekstual menjadi salah satu penyebab utama menurunnya angka partisipasi sekolah. Meskipun program nasional seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berjalan, pelaksanaannya belum disesuaikan dengan kebutuhan dan realitas lokal. Misalnya, alokasi dana BOS tidak memperhitungkan ongkos logistik tinggi di daerah pesisir terpencil seperti Okaba, sehingga sekolah mengalami kesulitan dalam pengadaan alat tulis, bahan ajar, dan fasilitas pendukung. Selain itu, intervensi pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan guru kontrak atau fasilitas transportasi pelajar masih belum merata dan cenderung bersifat sementara. Ketiadaan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis wilayah menyebabkan kebijakan pendidikan berjalan secara generik dan top-down, tanpa menyentuh akar persoalan partisipasi pendidikan di komunitas pesisir dan adat. Dengan demikian, diperlukan formulasi kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, berbasis data lokal, dan melibatkan partisipasi komunitas secara aktif.

Tabel 5. Ketidaksesuaian Program Pendidikan dengan Kebutuhan Kontekstual di Distrik Okaba

Program Pendidikan	Tujuan Umum	Realitas di Lapangan (Okaba)	Dampak terhadap APS
Program Indonesia Pintar	Membantu siswa miskin tetap sekolah	Distribusi bantuan tidak merata dan sering terlambat	Banyak siswa keluar sekolah karena kebutuhan tak terpenuhi
Dana BOS	Mendukung operasional sekolah	Tidak mencukupi karena biaya logistik tinggi dan akses sulit	Kegiatan belajar terganggu karena minimnya sarana

Pengangkatan Guru Kontrak	Mengatasi kekurangan guru di daerah	Guru sering pindah atau tidak betah tinggal di lokasi	Tidak ada keberlanjutan proses pembelajaran
Transportasi Sekolah	Mempermudah akses ke sekolah	Tidak tersedia di sebagian besar kampung pesisir	Anak-anak enggan berangkat sekolah secara rutin

Tabel 5 mengilustrasikan ketidaksesuaian antara desain program pendidikan nasional dan kebutuhan faktual di lapangan pada wilayah Distrik Okaba. Program Indonesia Pintar yang bertujuan memberikan bantuan langsung kepada siswa dari keluarga miskin, dalam praktiknya menghadapi kendala distribusi yang tidak merata dan keterlambatan penyaluran, sehingga banyak siswa tetap mengalami tekanan ekonomi yang memaksa mereka berhenti sekolah. Sementara itu, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya menopang operasional pendidikan, menjadi kurang efektif di wilayah seperti Okaba yang menghadapi tantangan logistik tinggi akibat letak geografis terpencil dan akses transportasi terbatas, menyebabkan sarana dan prasarana pembelajaran tidak terpenuhi secara optimal. Program pengangkatan guru kontrak juga belum memberikan dampak signifikan karena rendahnya tingkat retensi guru, yang disebabkan oleh minimnya insentif dan fasilitas penunjang kehidupan di lokasi penugasan. Hal serupa terjadi pada program transportasi sekolah yang idealnya mempermudah akses siswa, namun tidak tersedia di sebagian besar kampung pesisir Distrik Okaba, sehingga anak-anak harus berjalan jauh dengan risiko keselamatan tinggi. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan lokal dan responsif terhadap kondisi geografis serta sosio-kultural masyarakat setempat, guna mencegah stagnasi bahkan penurunan angka partisipasi sekolah di wilayah terpencil.

Minimnya partisipasi komunitas lokal dalam pendidikan menjadi faktor signifikan yang berkontribusi terhadap rendahnya angka partisipasi sekolah di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Berdasarkan temuan lapangan, peran tokoh adat, pemuka agama, dan orang tua dalam mendukung pendidikan formal masih terbatas, baik dalam bentuk dukungan moral, kehadiran dalam kegiatan sekolah, maupun pengawasan terhadap kehadiran anak di sekolah. Sekolah-sekolah di wilayah ini jarang melibatkan komunitas dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, sehingga tercipta jarak struktural antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Ketiadaan forum komunikasi antara pihak sekolah dan komunitas turut memperlemah mekanisme advokasi terhadap anak putus sekolah. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang menyebabkan minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial. Oleh karena itu, membangun partisipasi komunitas yang aktif dan inklusif menjadi kunci dalam mendorong keberlanjutan pendidikan di wilayah terpencil seperti Distrik Okaba.

Tabel 6. Tingkat Partisipasi Komunitas dalam Aktivitas Pendidikan di Distrik Okaba

Aspek Komunitas	Partisipasi	Tingkat Keterlibatan	Bentuk Keterlibatan yang Umum	Hambatan Utama
Kehadiran sekolah	dalam rapat	Rendah	Hanya hadir saat pembagian raport	Tidak adanya undangan resmi, kurangnya minat
Dukungan bersekolah	terhadap anak	Rendah	Memberi bekal, sesekali mengantar	Fokus pada pekerjaan ladang dan nelayan
Keterlibatan adat/agama di sekolah	tokoh	Sangat rendah	Hampir tidak terlibat	Tidak ada ruang formal kolaborasi

Pengawasan kehadiran dan tugas anak	Rendah	Bertanya secara informal	Kurangnya pemahaman pentingnya pendidikan
Partisipasi dalam pembangunan sekolah	Sedang	Gotong royong perbaikan fisik	Tidak berkelanjutan, tidak terkoordinasi

Tabel 6 mengilustrasikan rendahnya tingkat partisipasi komunitas dalam berbagai aspek aktivitas pendidikan di Distrik Okaba. Sebagian besar bentuk keterlibatan masyarakat, seperti kehadiran dalam rapat sekolah, pengawasan terhadap kehadiran anak, dan dukungan dalam proses belajar, berada pada tingkat rendah hingga sangat rendah. Keterlibatan tokoh adat dan agama, yang seharusnya memiliki pengaruh sosial yang besar di komunitas, hampir tidak terlihat karena belum adanya ruang formal kolaborasi yang difasilitasi oleh sekolah. Hambatan utama yang muncul antara lain adalah kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pendidikan, prioritas ekonomi keluarga terhadap pekerjaan subsisten seperti bertani dan melaut, serta lemahnya komunikasi antara pihak sekolah dan komunitas. Meski ada partisipasi dalam bentuk gotong royong fisik, sifatnya masih sporadis dan tidak terintegrasi ke dalam program sekolah secara berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan angka partisipasi sekolah tidak cukup hanya melalui intervensi kelembagaan, tetapi juga memerlukan transformasi peran komunitas sebagai mitra aktif dalam pendidikan.

Keterbatasan aksesibilitas fisik akibat kondisi geografis yang kompleks menjadi faktor struktural utama yang secara langsung memengaruhi rendahnya angka partisipasi sekolah (APS) di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Letak geografis distrik ini yang berada di wilayah pesisir dan dikelilingi oleh bentang alam berupa rawa, sungai besar, dan hutan tropis menyebabkan sebagian besar kampung sulit dijangkau, baik oleh kendaraan darat maupun transportasi umum. Anak-anak usia sekolah di beberapa kampung harus menempuh jarak lebih dari 8 kilometer dengan berjalan kaki, menyeberangi sungai dengan perahu kayu, atau melintasi jalan berlumpur tanpa penerangan untuk mencapai sekolah. Kondisi ini semakin memburuk saat musim hujan, di mana banjir dan jalan terputus menyebabkan absensi siswa meningkat secara drastis bahkan hingga putus sekolah. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya oleh (Mfon 2024) dan (Angelakis et al. 2023), yang menunjukkan bahwa hambatan geografis di wilayah terpencil berkontribusi signifikan terhadap ketimpangan akses pendidikan, terutama di negara berkembang. Dalam konteks Okaba, absennya intervensi infrastruktur dasar seperti pembangunan jembatan, perahu sekolah, atau peningkatan jalan kampung mempertegas lemahnya respons kebijakan terhadap kebutuhan spasial lokal. Selain itu, akses guru ke sekolah juga terganggu, menyebabkan ketidakteraturan dalam proses pembelajaran. Situasi ini menciptakan siklus ketertinggalan, di mana keterbatasan akses tidak hanya menghambat kehadiran siswa tetapi juga menurunkan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, persoalan aksesibilitas fisik tidak dapat dipisahkan dari desain kebijakan pendidikan yang inklusif dan berbasis wilayah, yang secara spesifik menjawab tantangan geografis khas distrik perbatasan seperti Okaba.

Kualitas dan ketersediaan layanan pendidikan di Distrik Okaba merupakan faktor krusial yang secara langsung berdampak pada rendahnya angka partisipasi sekolah di wilayah ini. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah di distrik ini menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dasar, seperti ruang kelas yang tidak layak, kekurangan buku ajar, ketiadaan laboratorium, serta absennya fasilitas sanitasi yang memadai. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya tenaga pendidik profesional, di mana banyak guru berstatus kontrak atau honorer yang tidak menetap secara permanen karena faktor geografis dan insentif yang tidak memadai. Situasi ini menyebabkan rendahnya mutu pengajaran, tidak konsistennya proses belajar mengajar, serta kurangnya pembinaan akademik yang berkelanjutan bagi siswa.

Akibatnya, siswa kehilangan motivasi belajar dan cenderung memutuskan untuk berhenti sekolah lebih awal.

Kesenjangan dalam distribusi layanan pendidikan ini mencerminkan lemahnya kapasitas tata kelola pendidikan daerah dalam menjamin hak atas pendidikan dasar yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Beberapa program nasional seperti distribusi guru melalui skema afirmatif atau bantuan operasional sekolah belum sepenuhnya menjangkau unit pendidikan di kawasan terpencil seperti Okaba secara merata dan berkelanjutan. Temuan ini selaras dengan literatur global yang menegaskan bahwa kualitas layanan pendidikan, bukan hanya ketersediaannya secara fisik, memainkan peran esensial dalam mempertahankan partisipasi siswa, terutama di daerah Rural dan Marjinal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan di Distrik Okaba tidak hanya memerlukan penguatan infrastruktur, tetapi juga reformasi kebijakan rekrutmen dan distribusi guru, penyediaan fasilitas pembelajaran yang relevan secara lokal, serta dukungan logistik yang memadai untuk memastikan keberlanjutan proses pendidikan yang bermutu di wilayah perbatasan ini.

Dinamika sosial-budaya di Distrik Okaba menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap pendidikan formal, khususnya di kalangan komunitas adat yang masih memegang kuat sistem nilai tradisional. Dalam konteks ini, pendidikan sering kali tidak dipandang sebagai kebutuhan mendesak, melainkan sebagai pilihan sekunder yang dapat ditunda, terutama ketika berbenturan dengan tuntutan peran sosial atau kebutuhan ekonomi domestik. Banyak orang tua masih berorientasi pada praktik pewarisan keterampilan berbasis tradisi, seperti bertani, berburu, atau melaut, yang dianggap lebih relevan secara langsung terhadap keberlangsungan hidup keluarga dibandingkan pendidikan sekolah. Selain itu, konstruksi sosial mengenai peran gender turut memengaruhi rendahnya partisipasi anak perempuan, di mana mereka sering dibebani dengan tanggung jawab domestik atau dinikahkan pada usia muda, sehingga tidak menyelesaikan pendidikan dasar.

Temuan ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pendidikan sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial lokal yang belum terintegrasi secara harmonis dengan sistem pendidikan nasional. Bahkan, dalam beberapa kasus, pendidikan formal justru dianggap sebagai proses yang mengikis nilai-nilai budaya dan identitas lokal, karena minimnya muatan kontekstual dalam kurikulum dan pendekatan pengajaran. Menurut (Guise 2024) kerangka teoritis Bourdieu, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi capital budaya, di mana pendidikan formal tidak mampu mentransformasikan habitus lokal menjadi bentuk partisipasi yang bermakna dalam sistem sekolah. Ketegangan antara pendidikan dan budaya ini menciptakan jarak sosial dan psikologis antara sekolah dan masyarakat, sehingga partisipasi menjadi rendah dan berkelanjutan hanya pada sebagian kecil anak-anak yang orang tuanya sudah terekspos pada nilai-nilai pendidikan modern.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan pendidikan yang lebih partisipatif dan kontekstual, yang tidak hanya menyesuaikan isi kurikulum dengan kearifan lokal, tetapi juga melibatkan tokoh adat dan pemuka agama dalam proses edukasi. Strategi ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi pendidikan di mata masyarakat lokal, tetapi juga menurut (Uzorka, Akiyode, and Isa 2024) bisa menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap lembaga pendidikan, yang selama ini dirasakan asing oleh sebagian besar masyarakat Distrik Okaba. Transformasi persepsi terhadap pendidikan hanya akan terjadi jika sistem pendidikan mampu beradaptasi secara budaya dan membuktikan relevansinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Kondisi sosial ekonomi yang rendah menjadi faktor determinan utama dalam menurunnya angka partisipasi sekolah di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Mayoritas keluarga di wilayah ini menggantungkan hidup pada sektor informal seperti pertanian subsisten, nelayan tradisional, dan buruh musiman, dengan tingkat pendapatan yang fluktuatif dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, termasuk pendidikan anak. Dalam situasi ekonomi yang tertekan, anak-anak sering kali dilibatkan dalam aktivitas produktif keluarga seperti berkebun, menangkap ikan, atau menjaga adik, sehingga waktu dan energi mereka untuk mengikuti pendidikan formal sangat terbatas. Beban domestik ini tidak hanya mengganggu keberlanjutan kehadiran di sekolah, tetapi juga mengurangi konsentrasi belajar dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan. Menurut (Edeji 2024) temuan ini konsisten dengan teori *human capital* dan berbagai studi sebelumnya yang menegaskan bahwa keluarga dengan keterbatasan sumber daya ekonomi cenderung memprioritaskan kebutuhan jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang seperti pendidikan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua turut memperkuat siklus marginalisasi, di mana pendidikan belum dianggap sebagai instrumen utama mobilitas sosial atau jalan keluar dari kemiskinan. Akibatnya, banyak anak-anak di Distrik Okaba yang terjebak dalam lingkaran putus sekolah dan masuk ke dalam pasar kerja informal di usia dini. Fenomena ini memperjelas pentingnya pendekatan kebijakan yang holistik dan intersektoral, yang tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memperkuat dukungan sosial dan ekonomi bagi rumah tangga miskin, agar pendidikan dapat dijalani secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan seperti Okaba.

Salah satu faktor struktural yang memengaruhi penurunan angka partisipasi sekolah di Distrik Okaba adalah lemahnya partisipasi komunitas dalam sistem pendidikan formal. Masyarakat lokal, termasuk tokoh adat, pemuka agama, dan orang tua siswa, belum terlibat secara aktif dalam pengawasan, perencanaan, maupun pelaksanaan kegiatan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah, sebagian besar orang tua hanya berinteraksi dengan sekolah pada saat pembagian rapor atau ketika ada keperluan administratif, sementara dalam keseharian mereka kurang memberikan dukungan langsung terhadap kehadiran dan proses belajar anak. Rendahnya keterlibatan ini menunjukkan adanya jurang relasi antara institusi pendidikan dengan lingkungan sosialnya, yang menyebabkan pendidikan belum sepenuhnya menjadi isu kolektif di tingkat komunitas.

Minimnya pelibatan sosial ini berkaitan erat dengan ketiadaan mekanisme formal yang memungkinkan dialog antara sekolah dan komunitas berlangsung secara reguler. Sekolah tidak memiliki forum komunitas sekolah yang aktif seperti komite sekolah atau kelompok penggerak pendidikan berbasis kampung. Akibatnya, inisiatif untuk menanggulangi anak putus sekolah atau mengadvokasi hak pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil sepenuhnya dibebankan pada sekolah, tanpa dukungan struktural dari komunitas. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya tingkat literasi dan pendidikan orang tua, yang menyebabkan persepsi terhadap sekolah lebih bersifat simbolik daripada sebagai kebutuhan substansial untuk masa depan anak-anak mereka.

Keterputusan antara sekolah dan komunitas juga berdampak pada lemahnya pengawasan sosial terhadap perilaku dan kedisiplinan siswa. Banyak anak yang bolos sekolah atau putus sekolah tidak mendapatkan perhatian serius dari lingkungan sosialnya karena tidak adanya norma komunitas yang kuat dalam mendukung pendidikan. Dalam konteks ini, konsep social capital yang seharusnya menjadi penopang dalam membangun solidaritas dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan, belum berkembang secara optimal di Distrik Okaba. Sebagai perbandingan, studi serupa di wilayah tertinggal lain menunjukkan

bahwa ketika komunitas dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan pendidikan, angka partisipasi sekolah meningkat secara signifikan (Sivakumar, Jayasingh, and Shaik 2023).

Dengan demikian, pendekatan penguatan pendidikan di Distrik Okaba tidak bisa hanya bergantung pada penyediaan fasilitas atau guru, melainkan harus disertai dengan strategi *community engagement* yang sistematis. Intervensi berbasis komunitas yang mengintegrasikan tokoh adat, organisasi keagamaan, dan lembaga kampung ke dalam proses pendidikan, perlu dikembangkan untuk menciptakan rasa kepemilikan terhadap sekolah. Selain itu, pelatihan peningkatan kapasitas orang tua mengenai pentingnya pendidikan dan penyadartahuan tentang hak anak atas pendidikan menjadi langkah strategis yang dapat mendongkrak partisipasi sosial secara berkelanjutan.

Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah merancang berbagai program pendidikan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar, implementasi kebijakan di Distrik Okaba menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Program bantuan seperti Dana BOS, beasiswa siswa miskin, dan pengadaan sarana prasarana sering kali tidak tepat sasaran karena tidak mempertimbangkan konteks geografis, sosial, dan budaya lokal. Misalnya, beberapa sekolah di Okaba menerima bantuan buku atau perangkat digital tanpa didahului oleh pelatihan guru atau penyediaan infrastruktur listrik yang memadai, sehingga bantuan tersebut tidak efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Ketiadaan data mikro yang akurat dan mutakhir juga menjadi kendala serius dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan realitas kebutuhan siswa dan sekolah di wilayah terpencil.

Ketimpangan distribusi kebijakan juga terlihat dalam alokasi guru dan tenaga kependidikan. Sekolah-sekolah di wilayah mudah akses cenderung menerima guru lebih banyak dan berkualifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah-sekolah di kampung terpencil yang bahkan kekurangan guru tetap. Hal ini, menurut (Jesus et al. 2021) diperparah oleh lemahnya sistem *monitoring* dan evaluasi kebijakan, yang menyebabkan tidak adanya tindakan korektif yang sistemik terhadap ketimpangan tersebut. Ketimpangan ini bukan hanya mencerminkan kegagalan manajerial, tetapi juga memperlihatkan kurangnya perspektif keadilan spasial (*spatial equity*) dalam kebijakan pendidikan daerah.

Lebih jauh, pendekatan kebijakan yang cenderung *top-down* menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pendidikan. Kepala sekolah dan tokoh adat di Okaba, berdasarkan hasil wawancara, merasa bahwa kebijakan yang datang dari atas tidak memberi ruang untuk negosiasi atau penyesuaian terhadap kondisi lokal. Padahal, pelibatan masyarakat lokal sangat krusial untuk menciptakan rasa memiliki terhadap program pendidikan dan memperkuat legitimasi institusi sekolah di mata komunitas adat. Ketidakterlibatan ini juga berdampak pada lemahnya pengawasan sosial terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan seperti anak perempuan dan anak dari keluarga miskin.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reorientasi kebijakan pendidikan ke arah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis bukti lokal. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem perencanaan berbasis data spasial dan sosial yang lebih akurat untuk memetakan kebutuhan sekolah dan siswa secara spesifik. Selain itu, integrasi antara lembaga pendidikan, pemerintah kampung, dan lembaga adat harus diperkuat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bermakna secara sosial dan kultural bagi masyarakat Distrik Okaba. Dengan demikian, intervensi kebijakan tidak hanya menjangkau wilayah ini secara fisik, tetapi juga mampu menembus struktur sosial yang memengaruhi partisipasi pendidikan secara lebih substantif.

Rekomendasi strategis yang dihasilkan dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dan berbasis komunitas dalam mengatasi penurunan angka partisipasi sekolah di Distrik Okaba. Keterbatasan geografis dan minimnya infrastruktur pendidikan harus dijawab melalui investasi publik yang terarah, seperti pembangunan sarana transportasi antar kampung dan penyediaan asrama terpadu bagi siswa dari lokasi terpencil. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan pendidikan yang sensitif terhadap tantangan spasial dan sosial-ekonomi lokal, bukan sekadar memperluas akses formal, melainkan juga memastikan keberlanjutan partisipasi anak-anak dalam proses pembelajaran.

Selanjutnya, peningkatan kualitas layanan pendidikan harus menjadi prioritas melalui rekrutmen dan insentivisasi guru-guru berkualitas yang bersedia bertugas di wilayah terisolasi seperti Okaba. Menurut (Dimmock et al. 2021) penempatan tenaga pengajar perlu disertai dengan pelatihan kontekstual agar mereka mampu mengadaptasi metode pembelajaran terhadap budaya lokal serta keterbatasan sumber daya. Pemerintah kabupaten dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi untuk pengiriman guru magang atau program pengabdian masyarakat berbasis pendidikan sebagai strategi jangka menengah.

Partisipasi komunitas lokal juga harus ditingkatkan secara sistemik dengan mengaktifkan peran tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pendidikan. Sekolah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu menjadi simpul interaksi sosial yang memfasilitasi dialog rutin antara pendidik dan masyarakat. Pembentukan forum sekolah-komunitas yang formal dan didukung regulasi lokal dapat menjadi wahana untuk membahas isu kehadiran siswa, *dropout*, hingga kebijakan kurikuler berbasis lokal.

Di samping itu, intervensi ekonomi seperti bantuan langsung tunai berbasis pendidikan, subsidi transportasi siswa, dan program beasiswa afirmatif perlu diarahkan secara selektif kepada kelompok keluarga yang paling rentan. Kebijakan ini harus didesain dengan pendekatan *data-driven* (Wu et al. 2022), agar mampu menjangkau anak-anak yang selama ini terpinggirkan oleh sistem pendidikan arus utama. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan institusi keagamaan di wilayah Okaba juga dapat memperkuat kapasitas advokasi pendidikan secara lebih holistik dan inklusif. Secara lebih luas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di daerah perbatasan seperti Distrik Okaba tidak dapat disamakan dengan pendekatan di wilayah urban atau semi-urban. Diperlukan paradigma kebijakan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis nilai-nilai kearifan lokal sebagai landasan untuk membangun sistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Implikasi dari rekomendasi ini tidak hanya penting bagi Merauke, tetapi juga dapat menjadi model intervensi di wilayah terpencil dan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) lainnya di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan angka partisipasi sekolah di Distrik Okaba merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor geografis, sosial-ekonomi, kultural, dan kelembagaan. Ketimpangan akses fisik, keterbatasan infrastruktur pendidikan, rendahnya kualitas layanan belajar, serta minimnya partisipasi komunitas lokal terbukti menjadi determinan utama dalam menurunnya keterlibatan anak-anak usia sekolah dalam pendidikan formal. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap relevansi pendidikan yang rendah serta lemahnya intervensi kebijakan yang adaptif memperburuk kondisi ketertinggalan pendidikan di wilayah ini. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya perumusan kebijakan pendidikan yang tidak bersifat seragam (*one-size-fits-all*), melainkan dirancang secara

kontekstual dan berbasis bukti lokal. Upaya peningkatan partisipasi sekolah harus mencakup strategi lintas sektor yang menggabungkan investasi infrastruktur, penguatan kapasitas guru, partisipasi aktif komunitas, serta perlindungan sosial berbasis pendidikan. Dengan demikian, pendekatan pendidikan di wilayah terpencil seperti Distrik Okaba harus dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan wilayah perbatasan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelakis, Andreas N., Andrea G. Capodaglio, Mohammad Valipour, Jens Krasilnikoff, Abdelkader T. Ahmed, Laila Mandi, Vasileios A. Tzanakakis, Alper Baba, Rohitashw Kumar, and Xiaoyun Zheng. 2023. "Evolution of Floods: From Ancient Times to the Present Times (CA 7600 BC to the Present) and the Future." *Land* 12(6):1211.
- Dimmock, Clive, Cheng Yong Tan, Dong Nguyen, Tu Anh Tran, and Thang Truong Dinh. 2021. "Implementing Education System Reform: Local Adaptation in School Reform of Teaching and Learning." *International Journal of Educational Development* 80:102302.
- Edeji, Obinna Christian. 2024. "Neo-Liberalism, Human Capital Theory and the Right to Education: Economic Interpretation of the Purpose of Education." *Social Sciences & Humanities Open* 9:100734.
- Guise, Andy. 2024. "Stigma Power in Practice: Exploring the Contribution of Bourdieu's Theory to Stigma, Discrimination and Health Research." *Social Science & Medicine* 347:116774.
- Jesus, Tiago S., Sutanuka Bhattacharjya, Christina Papadimitriou, Yelena Bogdanova, Jacob Bentley, Juan Carlos Arango-Lasprilla, Sureshkumar Kamalakannan, and International Networking Group of the American Congress of Rehabilitation Medicine Refugee Empowerment Task Force. 2021. "Lockdown-Related Disparities Experienced by People with Disabilities during the First Wave of the COVID-19 Pandemic: Scoping Review with Thematic Analysis." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18(12):6178.
- Mfon, Unyime-Young. 2024. "Climate Change Outcomes and Educational Development: Implications of Flooding on Children's Well-Being and School Attendance in Bayelsa State, Nigeria." Pp. 483–503 in *The Climate-Health-Sustainability Nexus: Understanding the Interconnected Impact on Populations and the Environment*. Springer.
- Niloy, Ahnaf Chowdhury, Md Ashraful Bari, Jakia Sultana, Rup Chowdhury, Fareha Meem Raisa, Afsana Islam, Saadman Mahmud, Iffat Jahan, Moumita Sarkar, and Salma Akter. 2024. "Why Do Students Use ChatGPT? Answering through a Triangulation Approach." *Computers and Education: Artificial Intelligence* 6:100208.
- Permatasari, Paulina, Assyifa Szami Iلمان, Carol Ann Tilt, Dian Lestari, Saiful Islam, Rita Helbra Tenrini, Arif Budi Rahman, Agunan Paulus Samosir, and Irwanda Wisnu Wardhana. 2021. "The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals." *Sustainability* 13(21):12294.
- Prosen, Mirko. 2022. "Nursing Students' Perception of Gender-Defined Roles in Nursing: A Qualitative Descriptive Study." *BMC Nursing* 21(1):104.
- da Silva, Cláudio, Fátima Pereira, and José Pedro Amorim. 2024. "The Integration of Indigenous Knowledge in School: A Systematic Review." *Compare: A Journal of Comparative and International*

- Education 54(7):1210–28.
- Sivakumar, Arunkumar, Sudarsan Jayasingh, and Shahenaz Shaik. 2023. “Social Media Influence on Students’ Knowledge Sharing and Learning: An Empirical Study.” *Education Sciences* 13(7):745.
- Squires, Vicki. 2023. “Thematic Analysis.” Pp. 463–68 in *Varieties of qualitative research methods: Selected contextual perspectives*. Springer.
- Uzorka, Afam, Oluwole Akiyode, and Sulaiman Muhammad Isa. 2024. “Strategies for Engaging Students in Sustainability Initiatives and Fostering a Sense of Ownership and Responsibility towards Sustainable Development.” *Discover Sustainability* 5(1):320.
- Wu, Wanshu, Jinhua Guo, Ziyang Ma, and Kai Zhao. 2022. “Data-Driven Approach to Assess Street Safety: Large-Scale Analysis of the Microscopic Design.” *ISPRS International Journal of Geo-Information* 11(11):537.
- Žalėnienė, Inga, and Paulo Pereira. 2021. “Higher Education for Sustainability: A Global Perspective.” *Geography and Sustainability* 2(2):99–106.